



E-ISSN: 2723-3731

Jawa Dwipa

Jurnal Penelitian dan Penjaminan Mutu
Volume 4 Nomor 1 Juni 2023

KOMITMEN BERNEGARA MELALUI MODERASI HINDU

Oleh:

MM. Sri Widayati

Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah

mm.sriwidayati67@gmail.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beranekaragam suku bangsa dan budayanya, hal ini merupakan kekuatan terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berbagai tantangan bangsa mulai dari kemiskinan, radikalisme, terorisme, intoleransi, anti NKRI, anti Pancasila, bahkan anti terhadap pemerintah yang sah, silih berganti menggoncang bangsa Indonesia, tantangan tersebut merupakan sebuah permasalahan yang harus diatasi bersama melalui teologi kerukunan. Komitmen bernegara merupakan pondasi yang kuat di dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian bangsa. Moderasi dalam Agama Hindu merupakan salah satu unsur di dalam penciptaan kerukunan dan perdamaian tersebut. Dalam melaksanakan komitmen bernegara ini terdapat unsur empat (4) pilar kebangsaan yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, empat pilar ini dijunjung tinggi dan dipegang teguh oleh bangsa Indonesia yang merupakan kunci di dalam komitmen bernegara dan berbangsa. Maka dengan melalui moderasi Agama Hindu ini dapat menjawab dalam pelaksanaan komitmen bernegara sehingga tercipta kerukunan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.

Kata kunci: komitmen, bernegara, moderasi, Hindu

ABSTRACT

The Indonesian nation is a nation with a variety of ethnic groups and cultures, this is the greatest strength possessed by the Indonesian nation. Various national challenges ranging from poverty, radicalism, terrorism, intolerance, anti-NKRI, anti-Pancasila, even against the legitimate government, shaking the Indonesian nation one after another, these challenges are a problem that must be addressed together through the theology of harmony. Commitment to the state is a strong foundation in creating national harmony and peace. Moderation in Hinduism is one of the elements in the creation of harmony and peace. In carrying out this commitment to the state, there are four (4) pillars of nationality, namely: Pancasila, the 1945 Constitution (UUD 1945), the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) and Bhineka Tunggal Ika, these four pillars are upheld and held firmly by the Indonesian people. which is the key in the commitment to the state and the

nation. So, through moderation, Hinduism can answer in the implementation of the commitment of the state so as to create harmony in the life of the nation and state of Indonesia.

Keywords: commitment, state, moderation, hindu.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan tinta emas sejarah mencatat bahwa kemerdekaan yang di proklamirkan oleh Soekarno-Hatta merupakan tonggak sejarah yang sangat dalam pada ingatan rakyat Indonesia. Kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta merupakan impian rakyat Indonesia yang tercatat dalam sejarah rakyat Indonesia sampai akhir hayat di kandung badan tak akan pernah dilupakan.

Seiring dengan peristiwa kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia berupaya membangun sebuah negara yang merdeka bersatu dan berdaulat, wadah dalam kedaulatan tersebut adalah melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), NKRI adalah sebuah negara besar yang memiliki berbagai suku bangsa, menurut Data Badan Statistik (BPS-Kompas.com) menyebutkan terdapat 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 16.056 pulau.

Selain hal tersebut, disebutkan pula bahwa beberapa hal keunggulan -keunggulan NKRI adalah keunggulan geografis (sumber kekayaan alam), keunggulan demografis (sumber daya manusia) keunggulan sosial budaya sampai dengan keunggulan ideologis. Salah satu karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara dan bangsa adalah keberlangsungan bangsa Indonesia, kebesaran, keluasaan dan kemajemukannya, hal ini merupakan penambahan modal atau aset bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

Empat Pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika, serta seluruh masyarakat Indonesia dengan segala tekadnya. Kemudian adanya Empat Pilar Kebangsaan yang disosialisasikan oleh MPR RI (2015), dijelaskan tentang Empat Pilar Kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram dan sejahtera terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar dapat berdiri secara kokoh jika tiangnya rapuh maka bangunan itu akan mudah roboh.

Empat pilar disebut juga pondasi atau dasar yang menentukan kokohnya suatu bangunan. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderatio, yang berarti ke-sedang-an (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. n pengurangan kekerasan, dan 2. n penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, “orang itu bersikap moderat”, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa?biasa saja, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian

average (rata-rata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak) (I Nyoman Santiawan, 2021)

Masyarakat Hindu adalah salah satu bagian dari negara Indonesia, beragam sosial-budaya yang dimiliki oleh masyarakat Hindu yang merupakan nuansa keindahan tersendiri bagi bangsa Indonesia, keunikan yang dimiliki oleh umat Hindu yang merupakan Moderasi bagi umat Hindu adalah salah satu unsur terpenting dalam menciptakan komitmen bernegara sehingga dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan dan keanekaragaman suku dan budaya. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka artikel ini membahas tentang: **”Komitmen Bernegara Melalui Moderasi Hindu”**.

Fokus kajian ini adalah tentang komitmen bernegara dengan segala budayanya, agama, suku dan bahasa, bagaimana moderasi Hindu dapat menjadi jembatan di dalam sebuah tekad yang kuat untuk berkomitmen bernegara, berbangsa dan bertanah air, Bagaimana peran umat Hindu dalam moderasi Hindu untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan yang aman, tentram, damai dan sejahtera di negara Indonesia umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya. Tujuan penulisan ini adalah memahami kekuatan tekad yang kuat untuk dapat membuat satu komitmen bernegara melalui moderasi Hindu, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dengan saling menghargai dan menghormati antar umat agama yang satu dan yang lain.

Kemudian manfaat dari artikel ini:

1. Manfaat yang diharapkan yaitu tersedianya kajian tentang komitmen bernegara melalui moderasi Hindu sehingga tercipta kerukunan umat bergama dalam kehidupan yang tenang, aman dan sejahtera.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya Mata Kuliah Pancasila, Kewarganegaraan dan Pendidikan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu, Hukum Tata Negara maupun Hukum Normatif yang ada.
3. Diharapkan melalui moderasi Hindu akan tercermin sikap yang kuat dalam bernegara sehingga stabilitas nasional umumnya dapat senantiasa terjaga.

Dalam penulisan ini pendekatan yang digunakan adalah teori sosiologi Talcott Parson, disebutkan bahwa dalam teori ini fungsionalisme struktural merupakan sebuah sudut pandang luas yang mencakup dan atau termasuk kedalam sosiologi dan juga antropologi yang berupaya menafsirkan(mengartikan) masyarakat sebagai sebuah struktur (sosial) dengan bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi atau guna dari elemen-elemen konstituen, terutama norma, adat, tradisi dan institusi. Fungsionalisme struktural mendeskripsikan suatu tahap tertentu dalam pengembangan metodologis ilmu sosial, bukan sebuah mazhab pemikiran.

II. PEMBAHASAN

Selaras dengan arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat disebutkan bahwa Komitmen memiliki arti tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu.

Berkaitan dengan bangsa dan negara, maka komitmen bernegara memiliki arti sebuah tekad yang kuat dan sungguh-sungguh atau berusaha dengan semangat dan dorongan yang tinggi di dalam bernegara dan dalam penyelenggaraan negara, sehingga negara akan tertib aman dan damai, dengan demikian jika hal ini terwujud maka keberlangsungan atas negara menjadi terus menerus tanpa batas waktu.

Di dalam komitmen berbangsa dan bernegara, masyarakat atau rakyat Indonesia, harus memiliki suatu semangat atau tekad atau dorongan hati yang kuat untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen berarti pula sebagai sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Komitmen bernegara bagi bangsa Indonesia dapat melalui Pancasila dalam meneguhkan NKRI sebagai berikut:

1. Menegakkan supremasi hukum yaitu upaya atau kiat untuk menegakan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dan segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima dalam melindungi dan menjaga stabilitas nasional. Supremasi hukum memiliki implikasi menjaga masyarakat agar dalam menjalankan hak-haknya tidak terjerumus dalam tindakan di luar batas hukum yang acapkali berujung anarkhis.
2. Dengan Pancasila bangsa Indonesia berupaya menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dengan tanpa pandang bulu dan kontekstualisasi serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam semua peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di bidang pendidikan yang tidak hanya trampil namun juga mempertahankan, mengembangkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ciri khas dan identitas bangsa yang berbhineka Tunggal Ika. Rakyat Indonesia tentunya tidak pernah bisa melupakan momentum-momentum terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia bahwa “Bangsa Indonesia akan besar dan kuat bukan dari bangsa lain, tetapi oleh bangsa Indonesia sendiri, dan jika bangsa Indonesia mengalami perpecahan dan seandainya terjadi perpecahan pada bangsa Indonesia bukan dari bangsa lain melainkan dari bangsa Indonesia sendiri. Suko Wiyono. Bangsa Indonesia memiliki Empat (4) Pilar kehidupan yang digunakan sebagai tonggak/tiang bagi bangsa Indonesia yang merupakan unsur komitmen bernegara dan berbangsa yaitu:

A. Pembuktian

Bangsa Indonesia memiliki Empat (4) Pilar kehidupan yang digunakan sebagai tonggak/tiang bagi bangsa Indonesia yang merupakan unsur komitmen bernegara dan berbangsa yaitu:

1. Empat Unsur Komitmen Bernegara

a. Pilar pertama: Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia mempunyai makna sebagai dasar negara untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4. Pancasila sebagai dasar negara berarti menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan, ketatanegaraan negara dalam berbagai bidang Pancasila telah ada dalam segala bentuk

kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan pegangan yang kuat yang merupakan unsur didalam komitmen berbangsa dan bernegara.

b.Pilar kedua: UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD Tahun 1945 atau UUD 45 adalah sebuah dasar hukum tertulis, konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Republik Indonesia disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada kurun waktu tahun 1999-2002 UUD 1945 mengalami empat (4) kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Tujuan dari perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, keberadaan negara demokrasi dan negara hukum serta hal lain yang menyesuaikan dengan perkembangan kemauan dan kebutuhan negara Republik Indonesia. UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di negara Indonesia yang berisi tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia. Segala sesuatu yang ada dalam negara kita diatur oleh UUD 1945, kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan berpedoman kepada UUD 45 sebagai landasan hukum tertinggi, menjadi acuan dalam pembuatan undang-undang yang ada di tingkat bawah. Ketentuan di dalam UUD 1945 berisi ketentuan pokok yang penting saja, sehingga hal itu dapat terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

Manfaat UUD 1945 bagi warga negara serta bangsa dan negara adalah mengatur tentang norma dan hukum, menciptakan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi landasan untuk mengatur keseluruhan warga negara Indonesia, mengarahkan warga negara Indonesia, kepada kehidupan yang tertib dan damai agar terciptanya kehidupan yang tertib dan damai sejahtera, mampu menciptakan negara yang tertib, damai dan berwibawa, mampu menciptakan bangsa Indonesia sejahtera adil dan makmur, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatur setiap warga negara dan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, mengatur terjaminnya hak asasi sebagai warga negara, mengatur setiap warga negara, mengatur setiap warga negara, memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, mengatur setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara dan lain-lain keseluruhan yang terkandung didalam UUD 1945 dari dan untuk rakyat Indonesia sebagai landasan menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi kepada warga negara Indonesia.

c.Pilar ketiga: Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamlirkan dan dikumandangkan oleh Presiden Bung Karno dan Muh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian dibentuklah dan berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau yang membentang di wilayah diseluruh Indonesia, dengan berbagai suku bangsa dan bahasanya, merupakan daerah (socio kultur), memiliki bermacam adat, suku, keyakinan dan budaya. Inilah yang merupakan tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur (dikutip dari situs Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan) bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan

dengan bentuk Republik, kemudian bentuk negara ini tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Bentuk Negara Indonesia adalah Republik sehingga penyelenggara negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis, yang dibentuk melalui Pemilu (Pemilihan Umum), hal ini terkandung di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar “. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan merupakan lahirnya jiwa, hal ini harus disadari bahwa negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan berbagai ragam budayanya, dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Komnas.com).

Dari uraian tersebut di atas, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan suatu landasan yang kuat dimana merupakan persyaratan mutlak berdirinya sebuah negara. Dari sejarah awal mulanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dihasilkan dari perebutan dari kekuasaan para penjajah. Sebagai warga negara dan masyarakat kita wajib menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa guna keberlangsungan dan perkembangan bangsa Indonesia yang adil makmur dan sejahtera, hal ini merupakan harapan seluruh rakyat Indonesia, maka tekadkan hati yang kuat dan bulat dalam “komitmen bernegara” sehingga negara Indonesia menjadi negara yang tenang, tentram dan damai, yang dapat berlangsung secara terus-menerus dalam penyelenggaraan negara yang tidak akan tergoyahkan oleh rongrongan apapun, baik radikalisme maupun ekstremisme.

d.Pilar keempat: Bhineka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Frasa Bhineka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Bhineka berarti “beraneka ragam”. Kata “neka” dalam bahasa Sansekerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata ika berarti “iku” kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata ika berarti “iku”. Secara harafiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan “Bhinneka Tunggal Ika” diterjemahkan “Beraneka satu itu” tulisan ini mengandung makna “meskipun beraneka ragam satu itu” makna dari pernyataan tersebut bagi bangsa Indonesia adalah meskipun beraneka ragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Kalimat itu merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu kakawin Sutosumo, karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke 14 (wikipedia).

Empat Pilar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan pegangan kuat bagi bangsa Indonesia untuk bertekad bulat dan kuat bersatu padu dalam “Komitmen Bernegara” selalu menjaga dasar negara Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai dasar hukum konstituante, NKRI sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Semboyan Bangsa Indonesia. Keempat hal tersebut sebagai alat negara di dalam penyelenggaraan negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur sehingga tercipta rasa aman dan damai. Tekad yang terpatuh ini harus dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia baik jajaran atas maupun jajaran paling bawah.

2. Moderasi Hindu

Moderasi menurut para ahli adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Definisi moderasi adalah kegiatan untuk mengatur, memandu serta menengahi komunikasi interaktif baik yang berbentuk lisan maupun tulisan. Pengertian moderasi menurut KB BI adalah menengahi sesuatu masalah.

Disebutkan moderator adalah seorang yang bertugas memandu sebuah acara atau kegiatan agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, alur maupun aturan main yang bertujuan agar kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan memandu, mengarahkan dan menengahi komunikasi yang terjadi antara beberapa pihak baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Moderasi/moderator bersifat menengahi jika dalam suatu acara terjadi pro dan kontra. Bagi seorang moderator harus mampu menjaga kondisi dan situasi ketika terjadi debat antara pro dan kontra sehingga moderator harus benar-benar dapat menjaga jalannya dialog agar berlangsung adil, jujur serta sesuai dengan aturan hukum, sopan santun, tatakrama dan menjaga agar dialog tidak keluar dari ketentuan tema. Kata moderasi yang memiliki arti seperti tersebut merupakan sebuah ilmu untuk meredam, mengendalikan dan menetralkan suasana dari hal-hal yang menimbulkan konflik, melalui moderasi keadaan menjadi kondusif. Kata moderasi populer penggunaan berkaitan dengan keagamaan hal ini karena moderasi memiliki makna sebagai berikut moderasi adalah suatu kegiatan untuk melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Moderasi dalam agama bertujuan untuk menangkal atau menjadi solusi yang ampuh dalam merespon dinamika berkebangsaan di tengah maraknya intoleransi, radikalisme dan fanatisme kelompok berlebihan yang berpotensi merusak keutuhan bangsa. Di dalam mempelajari agama seharusnya dikaji dengan seksama terlebih dahulu agar mereka tetap menjadi umat yang “tengahan” yaitu menjadi umat yang berada di tengah artinya tidak terjebak dalam praktek beragama yang berlebihan, tidak terlalu literal atau menjadi liberalisme. Bagi keseluruhan umat beragama yang harus dipahami adalah bahwa agama itu bukanlah semata-mata untuk Tuhan, tetapi juga untuk manusia. ([http://www. Google.com-Bagus Purnomo](http://www.Google.com-BagusPurnomo)).

Kita tahu bahwa lawan dari moderasi adalah berlebihan-ekstrem musuh yang paling dekat dengan kita adalah sebagaimana yang termuat di dalam kekawin Ramayana 1.4 ragadi musuh maparori hatya tongwanya, tan madoh ring awak. Artinya bahwa musuh terbesar di hatilah tempatnya tiada jauh dari diri. Musuh yang dimaksud saat ini adalah budaya hidup konsumtif, gaya hidup hedonisme dimana orang-orang berpacu pada ekonomi dan pemenuhan gaya hidup yang serba glamour semata. Kemudian musuh yang lain bahaya penyalahgunaan narkoba, yang sangat merusak fisik dan mental para tunas bangsa. Musuh lainnya lagi adalah adanya paham radikalisme yang ekstrim yang berusaha menghancurkan ideologi bangsa kita.

Bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman (sosial budaya-sosio kultur) dengan berbagai macam agama, etnis, suku, budaya dan bahasa berada di bawah kesatuan negara Indonesia, maka tugas kesatuan negara Indonesia. Dengan demikian, tugas kita sebagai salah satu bagian dari negeri ini adalah menjaga bangsa ini agar tetap utuh dan bertahan dari berbagai upaya-upaya sparatisme kaum radikal, yang kita harapkan adalah agar geerasi penerus bangsa ini bangga dan hormat terhadap keberagaman dalam Bangsa Indonesia.

Sesungguhnya dalam ajaran Hindu yang dituangkan dalam ajaran Tri Hita Karana yang sudah mengakar dan mentradisi dalam perjalanan hidup yang dipraktekan dalam keseharian antara nilai agama, seni, budaya, tradisi dan adat-istiadat saling mewarnai, saling menguatkan satu dengan yang lain menjadi filsafat kehidupan yang unik menyebabkan banyak orang

penasaran mengadakan penelitian. Keunikan ini hanya bisa kita jumpai dalam ajaran Hindu. Sebelum wacana moderasi agama yakni mengambil jalan tengah. Dalam ajaran Hindu sudah menjalankan sejak agama Hindu ada. Makanya para orang tua, leluhur selalu menyadarkan kita tentang Tri Kono yakni Uttpeti Stiti Pralina. Lahir Hidup dan Mati, Bhraman Wisnu dan Siwa. Kita selalu dielingkan dan waspode sangkan paraning dumadi. Dalam ajaran Hindu dituangkan dalam ajaran Tri Hita Karana tiga penyebab kebahagiaan, Perhyangan, Pawongan dan Pelemahan. Bagaimana mewujudkan Perhyangan dalam keseharian yakni; melaksanakan puja bhakti dengan baik dan tulus. Ini sudah berjalan dari sejak dulu sampai sekarang, malah semakin maju dan eksistennya dimasyarakat. Ternyata ini yang bisa membawa umat Hindu pada kesejahteraan lahir dan batin (I Nyoman Warta, 2021)

Menurut Dirjen Bimas Hindu (Tri Handoko Seto) dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Hindu adalah Hindu yang berkualitas, Hindu yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda yang harus dikenal dan dibangun bersama. Peningkatan kualitas SDM tidak semata-mata bisa dilakukan pada sektor pendidikan, SDM yang bagus adalah yang memahami ajaran agamanya, mengamalkan ajaran agama itu kemudian ditopang dengan tingkat pendidikan yang baik, sehingga umat Hindu mampu meningkatkan harkat dan martabatnya dengan melalui kesejahteraan ekonomi.

Seiring dengan hal tersebut, dalam bernegara dan berbangsa para tokoh agama Hindu melakukan moderasi Hindu melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Sikap Umat Hindu Dalam Bersembahyang

Sikap sembahyang menurut agama Hindu disebut “Ashana” Sikap duduk. Beberapa sikap duduk antara lain: Padmasana, Sidhasana yaitu sikap sembahyang dengan duduk sebagaimana bunga teratai.

Sikap sembahyang yang demikian merupakan sikap yang mencerminkan ketenangan, tulus, pasrah, sikap tidak ingin mengganggu orang lain, sikap yang tenang dan damai, sikap masya rakat tidak berlebihan dalam berkehidupan di masyarakat.

2. Sikap Toleransi umat Hindu

Bahwa agama Hindu bersifat filosofis dan oleh karena itu dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain, dengan demikian agama Hindu bersifat toleransi. Sifat toleransinya ini teramat besar sehingga dapat menerima agama-agama lain dengan segala ajarannya.

Sikap hidup toleran ini dalam kerukunan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu wujud karakter bangsa Indonesia yang sangat urgen diimplementasikan di dalam masyarakat yang hidup berdampingan antar umat yang satu dan yang lain dengan berbeda-beda agamanya. Umat Hindu secara kontinu dan terus-menerus berupaya menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara dengan memupuk rasa toleransi yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Aktualisasi Masyarakat Hindu

Umat Hindu atau masyarakat Hindu di Kabupaten Klaten menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara melalui hal-hal yang bersifat positif, yaitu melalui “Aktualisasi Masyarakat Hindu di Kabupaten Klaten dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan positif yang

mencerminkan sikap “komitmen bernegara melalui Moderasi Hindu” dalam wadah organisasi umat Hindu antara lain:

a. Organisasi Persaudaraan Generasi Hindu Dharma (PGHD) Kabupaten Klaten

Ketua pada organisasi ini adalah

Mas Rudi, organisasi ini aktif di dalam kegiatan-kegiatan pengamanan, sosial dan kemanusiaan. Kegiatan ini juga menggalang kegiatan kerukunan umat dan menjalin toleransi antar umat beragama. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini sebagai berikut:

1. Aktif dalam kegiatan Pemuda Kabupaten Klaten dengan mengirimkan anggotanya pada pembentukan KNPI Kabupaten Klaten yang berlokasi disetiap titik kecamatan ada perwakilan KNPI yang dari umat Hindu.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan Posko Lebaran di beberapa titik kabupaten Klaten.
3. Berperan serta aktif didalam penggalangan dana untuk saudara-saudara yang terkena musibah bencana.
4. Ikut serta aktif di dalam acara “Haul Gus Dur” dll. (Lintas Agama).

Aktualisasi tersebut diatas merupakan cermin peran serta aktif para pemuda-pemudi Hindu dalam menunjukkan sikap berbangsa, bernegara dan cinta tanah air, para pemuda-pemudi Hindu berupaya ikut aktif dalam event-event yang berlatar belakang kerukunan antar umat beragama melalui moderasi Hindu di wilayah kabupaten Klaten.

b. Organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)

Organisasi ini dilantik di Pendapa Kabupaten Klaten periode 2016-2021 ketua IR. IGG. Hendrata Wisnu, kemudian masa jabatan tersebut berakhir dan pada masa bhakti 2021-2025 tugas Ketua tersebut diganti oleh Bp. Suparman. Tugas pada organisasi ini diharapkan dapat menjawab tantangan kedepan termasuk didalamnya isu kerukunan antar umat beragama dan sinergi kehidupan beragama di kabupaten Klaten Kegiatan ini merupakan aktualisasi dari masyarakat Hindu di Kabupaten Klaten sebagai cermin sikap dari kehidupan bernegara dan berbangsa melalui moderasi Hindu.

c. Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kabupaten Klaten

Organisasi ini adalah organisasi wanita sosial kemasyarakatan yang berlandaskan spiritual agama Hindu dan tumbuh di tengah-tengah kemajemukan kehidupan beragama serta kompleksitas permasalahan sosial masyarakat, mengemban tugas yang semakin berat, berbagai peran harus dilaksanakan oleh para wanita Hindu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era pengaruh isu keutamaan gender seperti saat ini, wanita Hindu diharapkan mampu memainkan perannya baik sebagai seorang wanita, seorang istri dan seorang ibu dirumah domestik maupun karier di ranah publik (Putri Sustini Koster).

d. Organisasi Kesatuan Mahasiswa

Hindu Dharma Indonesia (KMHD) Kabupaten Klaten

Organisasi yang di Ketuai oleh Tri Widhayani ini merupakan wadah di dalam pembentukan diri para mahasiswa dan pembentukan soft-skill yang tidak dapat langsung di bangku perkuliahan. Tujuan dari organisasi ini adalah mengobarkan semangat membangun SDM Hindu yang berkualitas serta mengaplikasikan ilmu yang didapat KMHD secara nyata di masyarakat.

d. Kiprah Penyuluh Agama Hindu

Peranan penyuluh dalam hal ini berkaitan dengan moderasi adalah sebagai penengah, sesuai dengan tugasnya. Penyuluh Agama Hindu memiliki tanggungjawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat masyarakat binaannya jika terdapat berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangannya yang merugikan. Fungsi daripada penyuluh adalah sebagai informatif, edukatif, konsultatif, advokatif, dengan mengingat kedudukan dan fungsi penyuluh tersebut amat penting peranannya di dalam memberikan pelajaran agama Hindu dengan mengutamakan moderasi Hindu maka sinergis untuk dapat melakukan hal-hal yang dapat mencerminkan sikap ‘komitmen bernegara’. Sesuai data di Kementerian Agama tahun 2015, mencapai 1.158.785 jiwa, dari jumlah tersebut pemeluk Agama Hindu berjumlah 6.662 jiwa. Di kawasan Kabupaten Klaten berdiri 40 Pura. Dalam hal melaksanakan persembahyangan dan peringatan-peringatan hari besar agama Hindu dilaksanakan dengan tertib dan khidmat, tema-tema yang diangkat pada hari-hari besar agama Hindu bernuansa “Kerukunan, Kebangsaan dan Keutuhan NKRI”. (Kutipan fokusjateng.com).Dibawah ini adalah tema-tema hari besar tersebut:

1. Perayaan Melasti Pada tahun 2018 -Tema yang diusung adalah “Melalui Catur Brata Penyepian dengan Mengangkat Solidaritas Perekat Kebersamaan dan Keutuhan NKRI”. Perayaan ini dilaksanakan pada Senin,12 Maret 2018. Rangkaian tersebut digelar di Umbul Geneng, Desa Ngrudul, Kecamatan Kebonarum, Klaten.
2. Perayaan Dharma Santi Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940/2019 Tema yang diusung adalah “Kita Wujudkan Nilai Ajaran Tri Hita Karana Dalam Memperkokoh dan Mempertahankan NKRI” Perayaan ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Klaten pada tanggal 6 April 2018.

e. Pendidikan

Kemajuan umat Hindu dibidang pendidikan di Kabupaten Klaten sangat maju pesat dan perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya STHD Klaten Jawa Tengah yang berdiri sejak tahun 1986, berlokasi di Desa Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Sejak berdiri hingga tahun 2019 STHD Klaten telah meluluskan 1.800 Guru Agama Hindu dan Penyuluh Agama Hindu dengan jenjang pendidikan D2 (1987) dan S1 dari tahun pertama hingga sekarang. Mahasiswa berasal dari seluruh penjuru di seluruh Indonesia. Ikon kampus STHD Klaten Jawa Tengah adalah: “Keharmonisan antar Umat Hindu dan Agama lainnya di Pulau Jawa.

Keharmonisan ini terlihat dari lingkungan kampus STHD Klaten Jawa Tengah di sebelah timur laut berdiri Gereja Kristen, disebelah utara berdiri Gereja Katolik, kemudian di sebelah barat agak jauh berdiri Masjid Al-Aqsa Masjid Besar Kabupaten Klaten, dan disebelah utara berdampingan dengan Gereja Katolik berdiri Masjid Kampung Morangan. Kemudian di depan Kampus STHD Klaten Jawa Tengah berdiri Pura Pitamaha dan Kantor PHDI Kab. Klaten.

Potret berdampingannya berbagai tempat ibadah di lingkungan STHD Klaten Jawa Tengah yang saling berdampingan ini menunjukkan bahwa STHD Klaten Jawa Tengah mengedepankan sikap moderasi Hindu dalam membangun bangsa dan komitmen bernegara dengan mendidik dan pembelajaran bagi tunas bangsa. Kemajuan peningkatan di bidang pendidikan ini terlihat adanyaajuan penegrian dari tahun 2013 dan pada tahun 2020 ini mendapatkan dukungan dari Dirjen Bimas Kementerian Agama Hindu, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Gubernur Propinsi Jawa Tengah. [Http://www. Google.com-Sugiman](http://www.Google.com-Sugiman)).

Dari uraian tersebut diatas, dapat dilihat bahwa umat Hindu di Kabupaten Klaten membentuk dirinya menjadi sosok masyarakat yang berkualitas, bertanggungjawab, mandiri, tertib berwibawa, toleransi, solidaritas dan berpendidikan, sehingga dari sini dapat dilakukan pembentukan kepribadian bagi seluruh umat Hindu di Kabupaten Klaten, baik melalui wadah organisasi, penyuluhan keagamaan, peringatan-peringatan hari besar agama Hindu yang bertepatan mendukung Kesatuan dan Persatuan NKRI dan Pembelajaran Pendidikan diharapkan dapat membentuk umat Hindu yang berkehidupan di tengah-tengah masyarakat ini dapat terkendali, tidak mudah terkena hasutan dan rongrongan apapun.

Sasaran utama dalam hal tertibnya sebuah penyelenggaraan negara adalah pada keadaan rakyatnya jika rakyatnya terkendali, tertib, rukun dan damai maka akan tercapai keinginan bersama untuk sebuah keharmonisan bernegara. Umat Hindu di Kabupaten Klaten adalah sosok masyarakat yang tertib, berwibawa, rukun dan damai. Hal ini merupakan aset besar bagi bangsa Indonesia untuk melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia untuk berkembang dan maju terus pantang mundur tanpa ada gangguan dan intimidasi apapun di dalam masyarakat dan di setiap bidang kehidupan.

III. PENUTUP

Dari paparan tersebut di atas dan menjawab permasalahan yang tersampaikan pada pendahuluan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, ras, agama dan bahasa serta budayanya, maka hendaknya seluruh warga masyarakat Indonesia harus menyadari dan menghormati antar umat beragama, antar suku dan bahasanya, antar ras dan sebagainya. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 yang menjelaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan Semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.
2. Moderasi Hindu menurut Dirjen Bimas Hindu (Tri Handoko Seto) dikatakan bahwa moderasi beragama di kalangan umat Hindu yang memiliki keberagaman budaya yang berbeda-beda yang harus dikenal dan dibangun bersama. Peningkatan kualitas SDM tidak semata-mata bisa dilakukan pada sektor pendidikan, SDM yang bagus adalah yang memahami ajaran agamanya, mengamalkan ajaran agamanya, kemudian ditopang dengan tingkat pendidikan yang baik, sehingga umat Hindu mampu meningkatkan harkat dan martabatnya dengan melalui kesejahteraan ekonomi, sehat fisik dan sehat ekonomi.
3. Unsur-unsur komitmen bernegara adalah adanya empat pilar yaitu Dasar Negara Indonesia Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, hal ini harus dipahami bersama oleh seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Hindu pada khususnya dipadukan dengan berbagai kegiatan sebagai aktualisasi moderasi Hindu di dalam bernegara.
4. Aktualisasi moderasi Hindu dalam bernegara ditunjukkan dengan tekad dan semangat jiwa nasionalisme dan patriotisme yang kuat dari seluruh umat Hindu di Kabupaten Klaten, dengan membentuk upaya-upaya sebagai berikut:
 1. Mendirikan organisasi-organisasi sebagai wadah kegiatan yang positif
 2. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan sebagai upaya dalam menciptakan SDM yang berkualitas.
 3. Peran penyuluh agama Hindu yang merupakan ujung tombak bagi pemerintah di dalam menyampaikan pesan-pesan agama dan pesan-pesan program pemerintah.

Dengan upaya-upaya tersebut maka moderasi Hindu merupakan jembatan perwujudan masyarakat Hindu dalam “komitmen bernegara dan berbangsa” di tanah air Indonesia, sehingga terciptanya masyarakat yang aman, tentram, nyaman, damai dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Santiawan, I. N. W. (2021). DIALOG LINTAS IMAN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA. *Widya Aksara*, 26(1), 102–110. <https://ejournal.sthd-jateng.ac.id/index.php/WidyaAksara/article/view/152/88>
- I Nyoman Warta, I. N. S. (2021). KEBHINEKAAN IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI TENGAH KEBERAGAMAN INDONESIA. *Prosiding STHD Klaten Jawa Tengah*, 1(1), 61–72. <https://prosiding.sthd-jateng.ac.id/index.php/psthd/article/view/35>

Sumber Hukum:

1. Pancasila
2. UUD 45
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).wikipedia

Sumber Internet:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parson Persons
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norman K.Denzim](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Norman_K.Denzim) dan Yvonna S.Lincoln dalam “The SAGE Handbook of Qualitative Research”
<http://www.google.com-MPR> RI-Empat Pilar. 2015
Wikipedia.2-3.Teori Talcott Parson
<http://www.google.com-Suko Wiyono>.46
<http://www.google.com-Kompas.com>
<http://www.google.com-wikipedia-Bhinneka> Tunggal Ika
www.google.com-KBBI.Moderasi
<http://www.google.com-Tri Handoko Seto-Dirjen Bimas> Kementerian Agama Hindu
<http://www.google.com-Bagus Purnomo>
<http://www.google.com-pkj.com>
Kutipan: fokusjateng.com -

<http://www.google.com>

Fokus Jateng Klaten-Joko Larsono-Melasthi di Klaten, Umat Hindu Junjung

Solidaritas Kebersamaan dan Keutuhan NKRI

Fokus Jateng Klaten-Joko Larsono-Dharma Santi Hari Raya Nyepi. Kita Wujudkan Nilai Ajaran Tri Hita Karana Dalam Memperkokoh dan Mempertahankan NKRI.2018

<http://www.google.com>- Sugiman-Berdiri tahun 1986, cetak 1.800 guru dan penyuluh Agama Hindu-Kiprah Sekolah Tinggi Hindu Dharma (STHD) di Kabupaten Klaten Jawa Tengah.